



Efektivitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pada Destana Jatirejoyoso Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana

Effectiveness of Disaster Prevention and Preparedness Services at Destana Jatirejoyoso in an Effort to Reduce Disaster Risk

Nadira Nariya Vitasari¹, Muhammad Agus Muljanto²
¹Program Studi Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur,
Kota Surabaya, Indonesia
nadiranariyav@gmail.com, magusmuljanto@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Efektivitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pada Destana (Desa Tangguh Bencana) Jatirejoyoso Dalam Mengurangi Risiko Bencana. Desa Tangguh Bencana merupakan program gagasan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kemudian diintegrasikan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Malang pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Dalam Destana, terdapat forum yang dibentuk yakni Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Melalui pembentukan Destana, diharapkan masyarakat desa di Kabupaten Malang dapat lebih tangguh dalam menghadapi dan mengatasi bencana. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis studi kasus, dan efektivitas pelayanan akan diukur menggunakan teori Duncan (1973) dengan 3 dimensinya: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Hasil menunjukkan bahwa pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui Destana Jatirejoyoso masih belum efektif dalam mengurangi risiko bencana. Dari 3 dimensi, hanya dimensi integrasi yang berjalan dengan optimal. Dimensi pencapaian tujuan berjalan tidak optimal sebab kurangnya pemahaman Penanggulangan Bencana (PB) oleh masyarakat. Sementara itu, dimensi pencapaian tujuan tidak optimal sebab, pasifnya FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) Destana Jatirejoyoso, dan kurangnya sarana prasarana seperti peralatan kebencanaan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa Jatirejoyoso guna memprioritaskan kegiatan dan pengadaan sarana prasarana kebencanaan.

Kata kunci: Bencana; Desa Tangguh Bencana; Efektivitas; Risiko Bencana

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of disaster prevention and preparedness services at Destana (Disaster Resilient Village) Jatirejoyoso in reducing disaster risk. Disaster Resilient Village is a program initiated by BNPB (National Disaster Management Agency) which was then integrated by BPBD (Regional Disaster Management Agency) Malang Regency in Disaster Prevention and Preparedness Services. In Destana, there is a forum formed, namely the Disaster Risk Reduction Forum (FPRB). Through the formation of Destana, it is hoped that village communities in Malang Regency can be more resilient in facing and overcoming disasters. The method used is qualitative with the type of case study, and service effectiveness will be measured using Duncan's theory (1973) with its 3 dimensions: Goal Achievement, Integration, and Adaptation. The results show that disaster prevention and preparedness services through Destana Jatirejoyoso are still not effective in reducing disaster risk. Of the 3 dimensions, only the integration dimension is running optimally. The dimension of achieving goals is not optimal

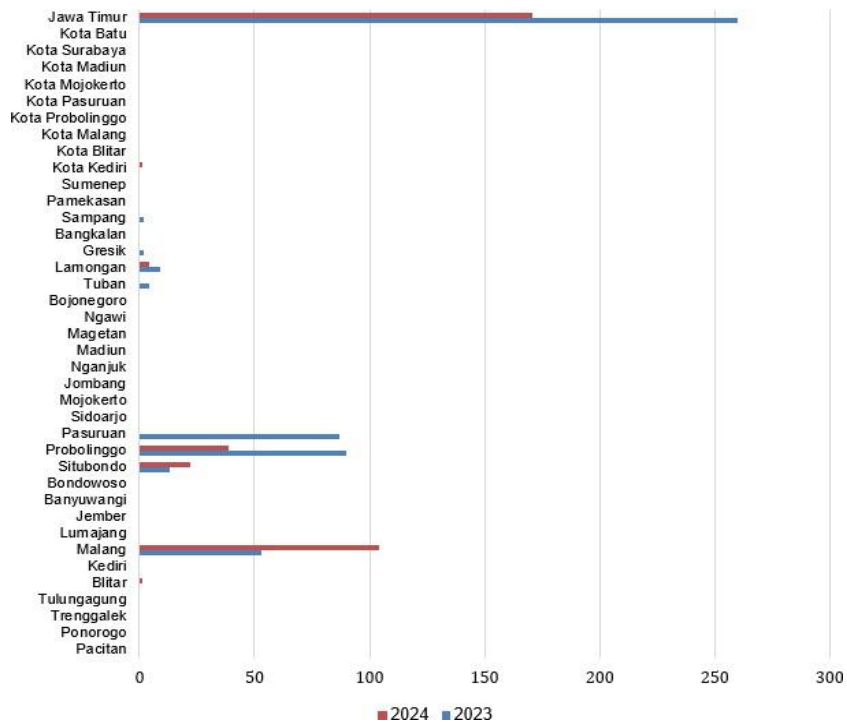
because of the lack of understanding of Disaster Management (DM) by the community. Meanwhile, the dimension of achieving goals is not optimal because of the passivity of the Destana Jatirejoyoso FPRB (Disaster Risk Reduction Forum), and the lack of infrastructure such as disaster equipment. Therefore, it is important for the Jatirejoyoso Village Government to prioritize activities and procurement of disaster infrastructure.

Keywords: *Disaster; Disaster Resilient Village; Disaster Risk; Effectiveness*

I. PENDAHULUAN

Selain sebagai negara tropis, Negara Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Hal itu dibuktikan dengan total luas wilayah lautannya yakni 2/3 dari total luas keseluruhan (Sabir & Mokodompit, 2023). Indonesia juga dilewati oleh jalur pegunungan lipatan dunia dan dua gunung api besar dunia. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia berpotensi lebih besar mengalami bencana (Wiyatiningsih, 2020). Bahkan secara global, sesuai *World Risk Report* tahun 2022, Indonesia sempat menduduki peringkat ketiga sebagai negara paling rawan bencana di dunia (Putri, 2022). Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna menanggulangi bencana yakni dengan UU RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam regulasi tersebut, dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007.

Berdasarkan penelitian Baldah et al. (2023), Jawa Timur termasuk dalam kategori 1 sebagai daerah rawan bencana. Secara geologi dan hidrologi, Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah pegunungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Beberapa di antaranya adalah Gunung Ijen, Argopuro, Bromo, Semeru, Kelud, Lawu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas. Selaras dengan itu, Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional Provinsi Jawa Timur 2022 – 2026 menyebutkan bahwa Kabupaten Malang merupakan wilayah yang berisiko tinggi mengalami bencana. Pernyataan tersebut didukung dengan data dari dibi.bnpb.go.id tahun 2025 pada gambar 1. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Malang mengalami banyak bencana, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2024.



Gambar 1. Jumlah Bencana Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2023- 2024
Sumber: Diolah dari bnpb.go.id, 2025

Melihat potensi bencana yang tinggi di Kabupaten Malang, maka dibentuk juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang. Pembentukan tersebut sesuai dengan pasal 18 UU RI No. 24 tahun 2007. Pada tahun 2021–2026, BPBD Kabupaten Malang telah menetapkan salah satu tujuannya yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana (BPBD Kabupaten Malang, 2021). Tujuan tersebut sejalan dengan keluaran sub kegiatan Program Penanggulangan Bencana, yakni pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. (BPBD Kabupaten Malang, 2022).

Dalam pengurangan risiko bencana, peningkatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbagai sub kegiatan mulai dari pra hingga pasca kebencanaan. Sehingga hal tersebut tidak selaras dengan pernyataan Suminto (2023) yang menyebutkan bahwa strategi BPBD Kabupaten Malang lebih fokus pada penanganan setelah bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana mencakup 8 sub kegiatan, salah satunya Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana merupakan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan mengantisipasi ancaman bencana, serta mampu pulih dengan cepat dari berbagai dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Melalui Destana, harapannya risiko bendananya mampu diminimalisir. Namun, data pada Tabel 1 menunjukkan sebaliknya bahwa terdapat peningkatan jumlah bencana dan total kerugian pada tahun 2022.

Tabel 1. Banyaknya Jumlah Bencana Alam Menurut Jumlah Korban, Kerugian Kabupaten Malang 2016-2023

Tahun	Banyaknya Bencana Alam	Jumlah Korban Jiwa		Hancur	Rusak	Kerugian (Juta Rupiah)
		Mati	Luka			
2016	55	2	-	45	356	10.090,50
2017	70	1	18	-	259	171,25
2018	76	-	3	-	217	199,40
2019	86	-	-	-	380	926,55
2020	154	-	-	4	431	987,00
2021	248	7	10	-	-	3,017
2022	300	3	15	36	576	3.183,50
2023	278	4	8	21	1.634	1.001,40

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2024

Sadono Irawan, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, mengungkapkan melalui radarbatu.jawapos.com tahun 2024, tingginya bencana di Kabupaten Malang tahun 2022 disebabkan oleh fenomena La Nina (Wicaksana, 2024). Namun, tingginya risiko bencana pada tahun 2022 tidak hanya disebabkan oleh fenomena La Nina. Kejadian tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Salah satu contohnya adalah program Destana, yang hingga tahun 2024 baru terbentuk 112 desa dari total 378 desa. Melalui riset pra-penelitian yang telah dilaksanakan kepada Ibu Silvia Verdiana, selaku staff bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, pembentukan Destana diprioritaskan pada desa-desa yang berisiko tinggi mengalami bencana. Sehingga masih terdapat banyak desa yang belum terbentuk Destana. Dalam Destana, akan terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang bertugas saat pencegahan dan mitigasi bencana. Diharapkan keberadaan FPRB dapat mempercepat dan meningkatkan respons terhadap bencana. Dengan demikian, risiko bencana dapat diminimalisir. Pada tahun 2024, BPBD telah membentuk beberapa Desa Tangguh Bencana (Destana), salah satunya di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen. Di Kecamatan Kepanjen sendiri, Desa Jatirejoyoso menjadi satu-satunya desa yang telah terbentuk Destana. Pembentukan Destana di Desa Jatirejoyoso dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Jatirejoyoso No. 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Berdasarkan Hadaf et al. (2022) Desa Jatirejoyoso secara topografis memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 1.500,00 mm. Kelembapan udaranya sekitar 20,00°C, dengan suhu rata-rata harian sebesar 27,00°C. Selain itu, berdasarkan hasil pra-penelitian dengan Bapak Mukhamad Afifudin, Ketua Desa Tangguh Bencana Jatirejoyoso, desa tersebut memang memiliki potensi banjir. Namun, banjir yang terjadi setiap tahun hanya menggenangi Dusun Tamanayu dan biasanya surut dalam beberapa jam.

Genangan terjadi akibat letak dusun yang dekat dengan Sungai.

Selama satu tahun terbentuk, Bapak Afifudin juga mengungkapkan kendala Destana Jatirejoyoso adalah kurangnya sarana prasarana. Sarana prasarana yang dimaksud seperti peralatan kebencanaan, contohnya alat pemotong pohon, APAR (Alat Pemadam Kebakaran), pelampung, dan sebagainya. Keterbatasan peralatan yang dimiliki sering kali membuat Destana Jatirejoyoso meminta bantuan kepada BPBD Kabupaten Malang dalam menangani bencana. Dengan demikian, terbatasnya sarana dan prasarana secara tidak langsung menghambat Destana Jatirejoyoso dalam menangani bencana yang terjadi.

Hambatan yang terjadi mampu mengganggu optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi bencana oleh Destana Jatirejoyoso. Oleh karena peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian terkait “Efektivitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pada Destana Jatirejoyoso Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana”. Adapun tujuan penelitian ini ialah mengetahui sejauh mana efektivitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada destana jatirejoyoso dalam upaya mengurangi risiko bencana. Penelitian ini hampir selaras dengan penelitian Dzunurroini (2023), namun lokasi yang diambil peneliti berbeda dengan lokasi penelitian tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Selama penelitian berlangsung, metode kualitatif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan studi kasus. Kualitatif menurut Sugiyono (2022:9) lebih mengacu pada keadaan sosial yang akan diteliti secara mendalam. Sesuai dengan pernyataan tersebut, keadaan sosial yang akan diteliti secara mendalam adalah terkait efektivitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui Destana Jatirejoyoso dalam mengurangi risiko bencana. Sementara itu, sumber datanya berupa: 1) Data primer, ialah dokumen ataupun bahan yang diungkapkan oleh pihak atau orang yang ada di tempat peristiwa (Citriadin, 2020). Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta dokumen dokumen penting dari informan utama; 2) Data Sekunder, ialah bahan kajian yang diungkapkan oleh orang yang tidak ada di tempat peristiwa atau tidak terlibat secara langsung. Selama penelitian ini dilaksanakan, sumber data sekundernya diperoleh melalui berita-berita, sumber literatur (jurnal, buku, arsip) yang dianggap relevan dengan penelitian peneliti.

Sementara itu, data dikumpulkan melalui 3 cara yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, seperti mempunyai pengetahuan terkait mitigasi bencana, terlibat secara langsung dalam kegiatan desa tangguh bencana, bertempat tinggal di lokasi penelitian, bersedia memberi informasi dengan kooperatif dan terbuka. Beberapa informan yang telah terpilih yakni: 1) Staff BPBD Kabupaten Malang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2) Staff Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Bidang Pemerintahan; 3) Ketua

Destana Jatirejoyoso, dan; 4) Masyarakat Jatirejoyoso. Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang mencakup beberapa komponen, yakni: 1) *Data collection*, data-data yang dikumpulkan terkait Destana Jatirejoyoso Kabupaten Malang diperoleh melalui hasil observasi atau pengamatan, *interview*, serta dokumentasi. Data mulanya masih bersifat umum, selanjutnya seluruh hal yang didengar akan dicatat secara menyeluruh. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih variatif terkait sejauh mana keefektifan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana melalui desa tangguh bencana Jatirejoyoso dalam mengurangi risiko bencana; 2) *Data condensation*, data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan akan dipilih, difokuskan, serta disederhanakan. Sehingga kegiatan ini akan membantu peneliti guna mengumpulkan data berikutnya, serta mempermudah dalam mencari data yang diinginkan terkait efektivitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana melalui Destana Jatirejoyoso; 3) *Data display*, dalam langkah ini, data terkait Destana Jatirejoyoso Kabupaten Malang akan disajikan dengan pola yang terorganisir melalui bagan, uraian singkat, dan sebagainya; 4) *Conclusions drawing/verification*, kesimpulan yang diberikan dalam penelitian ini merupakan bentuk tafsiran akhir yang dimulai dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, hingga tahapan menampilkan data (*display data*) terkait Destana di Desa Jatirejoyoso.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diukur efektivitasnya menggunakan teori Duncan (1973) dengan 3 dimensi pengukurannya yakni: 1) Pencapaian Tujuan; 2) Integrasi; 3) Adaptasi. Duncan (1973) dalam Steers (1980:193) mengungkapkan bahwa efektivitas lebih difokuskan pada potensi organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sebagai bentuk organisasi yang efektif. Berangkat dari definisi tersebut, maka teori Duncan dipilih karena ketiga dimensinya dianggap sangat sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian, yaitu terkait isu perubahan lingkungan, khususnya perubahan iklim dalam konteks kebencanaan. Berikut ini merupakan penjelasan lebih mendalam terkait hasil dan pembahasan masing-masing dimensi pengukuran.

1. Pencapaian Tujuan

Menurut Duncan (1973) Pencapaian Tujuan ialah sejauh mana sistem mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara formal. Dimensi ini meliputi tujuan dan sasaran. Dalam Peraturan Bupati Malang No. 127 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang Tahun 2023-2027, telah tertuang tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta tujuan dan sasaran pembentukan destana yang disajikan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pembentukan Destana

PERATURAN BUPATI MALANG NO. 127 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023-2027		
Sub Fokus	SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pembentukan Destana
Tujuan	untuk meningkatkan pemahaman dan tata kelola kebijakan PB (Penanggulangan Bencana) antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), masyarakat dan lembaga	mewujudkan ketangguhan masyarakat yang inklusi dalam menghadapi bencana
Sasaran	pengetahuan dan pemahaman yang merata tentang tata kelola kebijakan PB (Penanggulangan Bencana) yang dimiliki semua pihak (Pentaheliks)	terwujudnya ketangguhan masyarakat yang inklusi dalam menghadapi bencana

Sumber: Peraturan Bupati Malang No. 127 Tahun 2023

Tujuan dan sasaran dalam tabel 2 menjadi pengukuran efektif atau tidaknya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui Destana Jatirejoyoso pada dimensi pencapaian tujuan ini. Sementara itu, kedua tujuan dan sasaran tersebut saling berhubungan. Artinya, untuk mencapai tujuan, semua pihak perlu memahami kebijakan penanggulangan bencana. Dengan pemahaman yang baik terhadap seluruh *stakeholder*, termasuk masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan kemandirian dan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Salah satu upaya BPBD Kabupaten Malang guna memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait PB (Penanggulangan Bencana) adalah melalui sosialisasi ketika pembentukan Destana. Pernyataan tersebut didukung dengan ungkapan Bapak Yulius, selaku staff bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, berikut ini:

“Kalau tujuan destana ini, kita kan di bidang 1 (satu) ya di bidang kesiapsiagaan itu kita mitigasi dulu. Jadi pengenalan atau pemahaman tentang bencana ke masyarakat. Jadi antisipasi bila masyarakat ini terdampak suatu bencana itu masyarakat udah siap, minimal itu. Jadi mitigasi ini langkah awal dan juga langkah sebelum pencegahan kesiapsiagaan juga” (Hasil wawancara 23 April 2025)

Ungkapan yang selaras juga diberikan oleh Bapak Mukhamad Afifudin, selaku Ketua Desa Tangguh Bencana, dan gambar 2 yang mendukung pernyataan di bawah ini:

“Ya itu mbak tujuannya Destana ini kan untuk mitigasi, untuk penanggulangan juga jadi semisal ada bencana yang terjadi kita bisa langsung menghadapi secara mandiri gitu. Itu kan ada pelatihannya di awal pembentukan, kalau nggak salah pembentukannya tanggal 5 Maret, iya 5 Maret tahun kemarin, itu sampe 3 hari. Terus dikasih materi, tapi langsung praktek. Yang pertama tentang mitigasi, dan pasca bencana. Intinya untuk penanggulangan.” (hasil wawancara 14 April 2025)



Gambar 2. Pelatihan dan Pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana) Jatirejoyoso

Sumber: Pemerintah Desa Jatirejoyoso, 2024

Sementara itu, untuk memberikan pemahaman penanggulangan bencana kepada masyarakat umum selain Destana, BPBD Kabupaten Malang juga melakukan upaya pemberian rambu kebencanaan bagi setiap Destana. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Bapak Yulis bahwa:

“Biasanya pemasangan rambu itu di luar 3 hari pembentukan, pertama materi kemudian penyusunan rambu seperti jalur evakuasi. Kalau kita kan nggak tau di desa itu daerah mana saja yang rawan, mangkanya melibatkan pihak desa, yang potensinya tinggi biasanya daerah mana kita tentukan dulu, setelah kita tentukan di daerah situ banyak penduduk apa nggak. Kalau memang banyak penduduk, baru kita buat jalur evakuasi” (Hasil Wawancara 4 April 2025)

Pernyataan mendukung juga diberikan oleh Bapak Chandra, selaku masyarakat Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso dan gambar 3 berikut ini:

“Terkait kebencanaan mungkin itu rambu-rambu kebencanaan. Sekarang sudah ada palang rambu-rambunya, contohnya kayak jalur evakuasi gitu mbak di setiap dusun di desa ini setau saya ada, ini di pertigaan depan kantor kepala desa itu juga ada mbak.” (Hasil Wawancara 4 April 2025)



Gambar 3. Rambu Jalur Evakuasi di Dusun Balong Desa Jatirejoyoso
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

Pemahaman terkait penanggulangan bencana tidak hanya terkait cara mengatasi bencana ketika bencana telah terjadi. Namun, juga harus ada pemahaman terkait tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jatirejoyoso. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat memahami tindakan pencegahan tersebut, sebab masih banyak ditemukan masyarakat Kepanjen, termasuk masyarakat Desa Jatirejoyoso, yang membuang sampah di sungai. Ungkapan tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan Bapak Supriono, selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kepanjen.

“Kalau musim hujan ini, 60% banjir karena sampah karena kesadaran masyarakatnya masih kurang. Masyarakat di Kepanjen ini kan semi perkotaan, kesadaran masyarakat perkotaan itu kan ya lebih apa ya mengandalkan egonya.” (Hasil wawancara tanggal 14 April 2025)

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh, maka mampu disimpulkan bahwa dimensi pencapaian tujuan masih belum berjalan dengan optimal. Upaya memberi pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintah desa melalui Anggota Destana telah berjalan dengan baik, akan tetapi berbeda dengan pemberian pemahaman yang dilaksanakan guna masyarakat umum. Salah satu upaya pemerataan pemahaman terkait penanggulangan bencana melalui rambu kebencanaan, termasuk tidak cukup. Sebab masih ditemukan banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Tindakan tersebut membuktikan bahwa masyarakat belum memiliki ketangguhan dalam mengatasi bencana yang terjadi secara mandiri. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentu akan berdampak juga pada upaya Destana Jatirejoyoso yang kurang optimal. Dalam penanggulangan bencana, mengatasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, BPBD, ataupun Destana, akan tetapi hal ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat setempat. Sebab dampak akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Tindakan membuang sampah di sungai mampu saja memicu terjadinya bencana lebih besar, seperti banjir bandang yang kemudian mengakibatkan longsor, dan

bencana selainnya.

2. Integrasi

Integrasi menurut Duncan (1973) yaitu bagaimana anggota sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem melalui peran yang jelas. Dimensi integrasi ini mencakup prosedur pembentukan Destana dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta komunikasi yang terjalin antar pelaku kebijakan. Pada daerah Kabupaten Malang, prosedur pembentukan Destana tidak tertulis secara tulisan, akan tetapi setiap tahunnya tahapan yang dilaksanakan dalam membentuk Destana tetaplah sama. Pernyataan tersebut didukung dengan ungkapan Bapak Yulius, selaku staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, berikut:

“Kalau prosedur pelayanan Destana nggak ada, mungkin lebih ke step by step-nya bagaimana membentuk Destana. Jadi awalnya musrenbang dulu, terus pemetaan lokasi yang itu, rawan itu, terus dibentuk. Setelah pemetaan itu biasanya desa yang kita pilih kita datangi dulu. Kita tawarkan mau nggak dibentuk Destana di desanya. Soalnya nggak semua menerima mbak, kadang juga ada yang menolak, jadi kita tanya dulu kesediaannya. Selama dibentuk itu selalu kami adakan pelatihan. Kalau misal destananya dibentuk dengan memakai anggaran dari kami biasanya pelatihannya 3 harian, tapi kalau desanya membentuk destananya mandiri pake anggaran sendiri itu juga bisa, tapi tetap kami meminta diadakan pelatihan, untuk berapa harinya itu terserah mereka. 1 hari juga boleh tergantung anggaran mereka. Tapi tetap materi yang kami berikan itu sama, ada teorinya terus dilanjut praktik. Terus untuk temanya beda mbak tergantung potensi bencana di desanya apa.” (Hasil wawancara 23 April 2025)

Tahapan tersebut dibenarkan oleh pihak Destana Jatirejoyoso, melalui ungkapan Pak Afifudin bahwa materi yang diberikan sesuai dengan bencana yang sering dialami oleh Desa Jatirejoyoso yaitu banjir:

“ya kemarin itu materinya tentang banjir, banjir bandang yang skalanya besar. Di Tamanayu kan ada sungai itu berpotensi kena. Terus kalau nggak salah kebakaran, iya kebakaran karena kemarin ada pemadamnya juga. Ya jadi kita diajari ketika ada api kita harus semprot airnya itu dari arah mana biar cepet padam, terus kalau misal ada korban itu pertolongan pertamanya gimana. Itu kemarin sempet dijelasin selama 3 hari itu. Kemarin juga ada penjelasan dikit itu terkait anggaran, iya anggaran untuk kebencanaan tiap tahun itu harus berapa, terus digunakan untuk membeli apa.” (Hasil wawancara tanggal 14 April 2025)

Bapak Yulius juga menambahkan beberapa tahapan selanjutnya dalam membentuk Destana melalui ungkapan berikut ini:

“Biasanya pemasangan rambu di luar 3 hari pembentukan, pertama materi kemudian penyusunan rambu seperti jalur evakuasi. Kalau kita kan nggak tau

di desa itu daerah mana saja yang rawan, mangkanya melibatkan pihak desa yang potensinya tinggi biasanya daerah mana. Kita tentukan dulu, setelah kita tentukan di daerah situ banyak penduduk apa nggak. Kalau memang banyak penduduk, baru kita buat jalur evakuasi. Terus setelah pembentukan kita biasanya ada link untuk barcode pengisian standar penilaian dari masyarakat. Mangkanya setelah pelatihan destana, waktu di forum itu kita sampaikan untuk mengisi SPM. Pembentukan destana ini masuk di Renstra, Rencana Strategis, jadi masuk penilaian Standar Penilaian Minimal BPBD. Yang dilihat mungkin penilaian kegiatan yang di awal, kalau penanganan bencana tidak masuk ke penilaian karena sudah melibatkan jajaran yang lain. Jadi penilaiannya ya di Destana itu.” (Hasil wawancara 23 April 2025)

Pengisian SPM (Standar Pelayanan Minimal) oleh masyarakat melalui barcode juga didukung dengan gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Barcode SPM BPBD Kabupaten Malang
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

Sementara itu, Komunikasi merupakan aspek yang penting dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya komunikasi yang baik satu dengan yang lain, maka tujuan dan sasaran yang diinginkan akan mudah tercapai, begitupun sebaliknya. Dalam sebuah pelayanan publik, aspek komunikasi sangat lah urgensi karena ketika memberikan pelayanan, pelaku kepentingan atau pejabat yang bersangkutan akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Begitu pula yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang. Sebagai instansi pemerintahan, BPBD Kabupaten Malang senantiasa menjaga komunikasi dengan masyarakat dan anggota Destana, selaku penerima pelayanan. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Yulius berikut ini:

“Bisa langsung ke kita juga bisa, bisa dari nomornya temen temen biasanya”
(Hasil Wawancara 23 April 2025)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Pak Afifudin, selaku ketua Destana Jatirejoyoso yang membenarkan bahwa pihaknya mampu meminta bantuan dengan menghubungi melalui nomor telepon sesuai dengan pernyataan berikut:

“Responnya BPBD cepet, karena disitu ada jadwalnya yang piket. Saya menghubungi melalui telfon. Saya telfon waktu itu malam jam 10 langsung meluncur ke sini orangnya. Aman aman saja, lancar, bpbd pun juga sering contact saya tanya gimana kabarnya desa sekarang. Jadi masih sering dipantau mbak, responnya juga cepat banget.” (Hasil wawancara 11 April 2025)

Pak Yulius membenarkan ungkapan tersebut bahwa di BPBD memang dilaksanakan piket secara rutin 24 jam setiap harinya. Piket tersebut dikhususkan staff PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat). Sehingga masyarakat yang ingin meminta bantuan dengan datang ke kantor secara langsung juga diperbolehkan. Secara lebih lengkapnya, perbedaan tugas keduanya dijelaskan juga oleh Pak Yulius berikut ini:

“Jadi kita kan di PUSDALOPS ada piket 24 jam, ada piket juga dari TRC. Lah biasanya ini kalau ada telfon dari masyarakat langsung kita respon, kita tanya dulu apa yang terjadi, kejadiannya dimana, jadi kita bisa memastikan alat apa yang dibawa semisal butuh disananya. Kalau di PUSDALOPS biasanya 2 orang, di TRC bisa 3 sampe 4 orang.” (Hasil wawancara 23 April 2025)

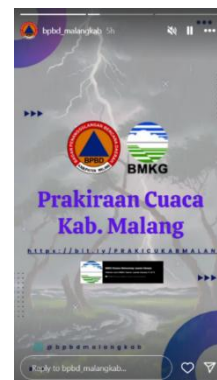
Sementara itu, tugas PUSDALOPS dan TRC juga dijelaskan perbedaannya melalui hasil pra-wawancara yang dilaksanakan kepada staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selainnya, Ibu Silvia, yang menambahkan bahwa:

“kalau PUSDALOPS bagiannya itu mengolah data, jadi data yang masuk akan diolah sama mereka. Terus dipublikasikan, mungkin publikasinya bisa dilihat di akun sosial media instagram BPBD. Foto bencana yang diunggah itu dari pihak PUSDALOPS yang publikasikan, disana kan lengkap ada tempat terjadinya, terus kapan, korban jiwanya juga lah data data itu didapatkan dari TRC. Jadi sebenarnya saling berhubungan dua ini.” (Hasil pra-wawancara 5 Maret 2025)

Berikut bentuk publikasi PUSDALOPS yang mampu masyarakat temukan secara mudah melalui akun sosial media instagram BPBD Kabupaten Malang yaitu @bpbd_malangkab sesuai dengan gambar 5 dan 6.



Gambar 5. Berita Bencana Banjir di Media Sosial Instagram BPBD Kabupaten Malang
 Sumber: BPBD Kabupaten Malang, 2025



Gambar 6. Postingan Prakiraan Cuaca di Kabupaten Malang
 Sumber: BPBD Kabupaten Malang, 2025

Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Malang juga turut serta menyediakan akses komunikasi masyarakat umum, tak terkecuali Destana, terhadap instansi-instansi pemerintahan. Salah satu instansi pemerintahan yang dimaksud termasuk BPBD Kabupaten Malang. Akses komunikasi yang dibentuk dinamakan layanan *call center* 112, sesuai dengan ungkapan Bapak Yulius berikut ini:

“yang baru baru ini layanan 112. 112 ini yang awalnya diskominfo memberikan ruang sebetulnya, 112 ini sebenarnya ini nanti bisa terkoneksi dengan pihak manapun. Mulai dari BPBD, damkar, PMI, TNI POLRI, bidang kesehatan, yang istilahnya pelayanan-pelayanan dasar bisa terkoneksi kesitu. Jadi dari informasi situ 112, pihak-pihak yang terkait kemudian akan meneruskan ke petugas lapangan. 112 untuk masyarakat sebetulnya, jadi memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi kalau dia nggak tau nomor telfon kita pakai 112 itu juga bisa. Biasanya langsung, menit atau bisa detik. Jadi memang ada gitu, katakanlah ada telfon dari masyarakat ke 112 nanti diterima operator, jadi di 112 ada operatornya sendiri yang akan meneruskan ke instansi, kalau misal urusan kebakaran nanti meneruskannya langsung ke kita. Kita nanti langsung ditelfon, lokasinya disini disini. Kalau kebakaran gitu biasanya juga di damkar. Kalau BPBD yang menerima pesan dari operator biasanya PUSDALOPS” (Hasil wawancara 23 April 2025)

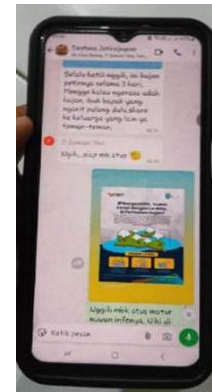
Sejalan dengan pernyataan Pak Yulius, sosialisasi *call center* 112 disebarluaskan oleh Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Malang melalui akun sosial media instagramnya @kominfokabmlg sesuai dengan gambar 7. Sementara itu, komunikasi antar anggota sesama Destana juga cukup baik sesuai dengan gambar 8 dan ungkapan Pak Afifudin berikut ini:

“Kalau selama ini yang saya tau di dusun lain, biasanya laporan ke saya itu langsung dari anggotanya, otomatis. Biasanya kita dengar oh disana ada

bencana, lah anggota itu udah langsung meluncur. Kadang di grup anggota lain juga saling mengingatkan 'ini cuacanya begini mohon hati-hati'." (Hasil wawancara 11 April 2025)



Gambar 7. Penyebaran Informasi *Call Center* 112 Oleh Diskominfo Kabupaten Malang Melalui Akun Sosial Media Instagram
Sumber: Diskominfo Kabupaten Malang, 2025



Gambar 8. Komunikasi Antar Anggota Melalui Grup Whatsapp
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilampirkan sebelumnya, maka mampu disimpulkan bahwa tidak terdapat dokumen secara resmi yang berisikan prosedur pembentukan Destana di Kabupaten Malang. Namun, setiap tahun BPBD Kabupaten Malang akan melaksanakan tindakan yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya dalam membentuk Destana. Oleh karena itu, beberapa tindakan tersebut terangkum menjadi beberapa tahapan, diantaranya: 1) Mengadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dengan berbagai kepala desa; 2) Memetakan wilayah/desa yang berisiko besar mengalami bencana; 3) Menawarkan pembentukan Destana di desa yang terpilih; 4) Melaksanakan pelatihan Destana di wilayah terpilih (pemberian materi kebencanaan dan materi dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) terkait penggunaan anggaran desa terkait kebencanaan); 5) Membentuk keanggotaan dan memetakan area yang berpotensi terdampak bencana dan dihuni oleh banyak masyarakat guna meletakkan rambu kebencanaan; 6) Pengisian SPM oleh masyarakat setelah pelatihan dilaksanakan; 7) Pemberian dan Pemasangan Rambu Kebencanaan, seperti rambu jalur evakuasi. Seluruh prosedur atau tahapan tersebut dilaksanakan dan diterima oleh Destana Jatirejoyoso, kecuali tahapan pemetaan risiko bencana yang memang hanya dilaksanakan oleh pihak BPBD terkait.

Sementara itu, dari segi komunikasi antar *stakeholder* juga dinilai cukup baik. Berbagai macam akses sebagai bentuk komunikasi sosial telah diberikan oleh pihak BPBD Kabupaten Malang dan pemerintahan Daerah Kabupaten Malang. Komunikasi sosial sendiri mampu diartikan sebagai upaya menukar perasaan, pikiran, ide, serta informasi antara kelompok ataupun individu di

sebuah masyarakat dengan maksud guna menyelaraskan kesepahaman, memahami satu sama lain, dan membangun hubungan sosial. Komunikasi sosial mampu dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam hal ini komunikasi sosial yang telah disediakan oleh BPBD dan Pemerintah Daerah diantaranya: 1) Layanan *call center* 112, layanan ini dilaksanakan oleh Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Malang. Layanan *call center* diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang guna mempermudah masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan dari berbagai instansi pemerintahan, seperti BPBD Kabupaten Malang. Sehingga laporan yang masuk melalui Layanan *call center* 112 akan diteruskan oleh operator layanan menuju instansi yang diinginkan. Pada BPBD Kabupaten Malang, laporan dari operator *call center* 112 akan diterima oleh PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi) yang bertugas menerima, mengolah, dan mempublikasi informasi; 2) Menghubungi nomor telepon BPBD Kabupaten Malang. Pada setiap unggahan gambar di akun sosial media instagram BPBD Kabupaten Malang yakni @bpbdd_kabupatenmalang akan selalu disertakan nomor telepon yang mampu dihubungi oleh masyarakat; 3) Menghubungi melalui media sosial. Seperti bukti-bukti pendukung yang telah diberikan mampu membuktikan bahwa BPBD Kabupaten Malang senantiasa aktif dalam menyebarkan informasi terkini. Informasi-informasi terkini diunggah melalui sosial media instagramnya yaitu @bpbdd_kabupatenmalang dengan tujuan agar mampu tersebar ke seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat mampu memanfaatkan media sosial tersebut guna menghubungi BPBD Kabupaten Malang secara lebih lanjut ataupun guna mengetahui informasi terkini berita seputar cuaca dan kebencanaan di Kabupaten Malang.

Selain itu, dari segi komunikasi komunitas yakni komunikasi antar anggota Destana Jatirejoyoso mampu dinyatakan cukup baik. Setiap terdapat bencana ataupun informasi peringatan kebencanaan, setiap anggota akan selalu mengingatkan. Jaringan yang digunakan dalam komunikasi komunitas ini dilaksanakan melalui media digital dengan grup *WhatsApp*. Dengan memanfaatkan media digital, informasi akan tersampaikan dengan cepat kepada seluruh anggota. Sehingga Destana Jatirejoyoso mampu mengambil tindakan dengan cepat apabila terjadi bencana di Desa Jatirejoyoso. Dengan demikian, baik prosedur pembentukan Destana ataupun komunikasi sosial yang terjalin antara BPBD serta Pemerintah Kabupaten Malang dengan seluruh Masyarakat Jatirejoyoso dinilai cukup baik. Sementara komunikasi komunitas antar anggota Destana Jatirejoyoso juga dinilai cukup baik. Sehingga dalam dimensi integrasi ini Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana melalui Destana Jatirejoyoso dianggap telah efektif guna mengurangi risiko bencana yang terjadi.

3. Adaptasi

Berdasarkan Duncan (1973) adaptasi adalah sejauh mana sistem beradaptasi dengan tuntutan baru yang diakibatkan oleh perubahan

lingkungannya. Dimensi ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan anggota Destana Jatirejoyoso. Umumnya dalam meningkatkan kemampuan anggota Destana, pihak BPBD akan memberi pelatihan ketika pembentukan Destana. Selanjutnya, peningkatan kemampuan melalui sosialisasi ataupun pelatihan mampu dilaksanakan secara mandiri oleh pihak Desa. Akan tetapi, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Destana Jatirejoyoso tidak rutin melaksanakan diskusi secara tatap muka ataupun melaksanakan kegiatan kebencanaan. Pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara Pak Afifudin, selaku ketua Destana Jatirejoyoso berikut ini.

“Kalau kemarin setelah materi dan praktek 3 hari dari BPBD itu kita juga sempet omong omongan sama temen-temen langkah apa yang harus kita lakukan. Karena kita disini juga minim bencana ya, ya jadinya kita pasif. Pasif maksudnya kita nunggu kalau terjadi bencana aja kita gerak. Jadi kita langsung gerak pas ada bencana.” (Hasil wawancara tanggal 11 April 2025)

Sementara itu, terkadang pihak BPBD Kabupaten Malang juga menyediakan pelatihan secara tidak langsung melalui aplikasi zoom. Namun, dalam pelatihan tersebut tidak semua Destana di Kabupaten Malang diikutsertakan. Pihak BPBD Kabupaten Malang hanya menyertakan Destana-Destana yang aktif melaporkan kegiatan kebencanaan ataupun kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di wilayahnya sesuai dengan hasil wawancara terhadap Pak Yulius berikut ini:

“ada pelatihan tapi secara online gitu kadang saya kirim ke grup Destana yang biasanya aktif laporan kegiatan. Jadi ada zoom diselenggarakan pihak luar BPBD, lalu saya kirim ke grup Destana eh ternyata anggotanya beneran join dan mengikuti pelatihan. Tapi nggak semua saya kirim link, tertentu aja yang biasanya aktif grupnya kirim laporan kegiatan FPRB-nya.” (hasil wawancara 23 April 2025)

Kepasifan berbagai Destana di Kabupaten Malang juga telah disadari oleh pihak BPBD Kabupaten Malang melalui hasil wawancara berikut ini:

“tapi yang jadi PR itu nantinya setelah pembentukannya forum ini eksis apa nggak di desa. Ada sebageian yang eksis sampe sekarang, ada yang setelah dibentuk ya sudah selesai. Jadi nanti kita evaluasi tahun berapa pas anggarannya ada kita evaluasi jadi peningkatan kapasitas. Ada yang pernah kita evaluasi hanya tinggal 5 personel, ada yang kita evaluasi tidak ada anggotanya karena perangkat desanya baru semua jadi nggak tau. Akhirnya kita bentuk lagi artinya diperbarui lagi SK desa. Nggak bisa dijadwalkan, karena kita kan di kabupaten Malang ada 390 desa kelurahan, dan destana kita masih 114 an.” (Hasil wawancara 23 April 2025)

Anggaran BPBD yang terbatas juga menjadi penyebab kurangnya sarana prasarana peralatan kebencanaan yang diberikan kepada setiap Destana. Oleh karena itu, harapannya peralatan kebencanaan mampu dianggarkan oleh pemerintah desanya masing masing sesuai dengan pernyataan Pak Yulius

berikut ini:

“ya terbatasnya anggaran itu sebenarnya juga menghambat kita ngasih sarana prasarana, lalu membentuk Destana itu juga sedikit setiap tahunnya. Maka dari itu waktu pelatihan pembentukan, kita kan juga ada materi dari DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu yang juga ngasih sosialisasi untuk kebencanaan di desa dapat menggunakan anggaran dari mana. Kemudian ada juga pembentukan destana ini disponsori oleh pihak swasta, contohnya tahun kemarin sebetulnya ada yang dibiayai oleh PLN. Kalau yang dengan PLN masuk dalam kerjasama, kalau dengan BPBD bentuknya PKS (Perjanjian Kerja Sama). Untuk 2025 ini sudah nggak, kita kebetulan murni APBD kabupaten sendiri 3 desa, kemudian dari provinsi mulai kemarin 1 desa.” (Hasil wawancara tanggal 23 April 2025)

Pernyataan Kerja Sama dengan pihak swasta tersebut didukung dengan gambar 9 berikut ini.



Gambar 9. Perjanjian Kerjasama PT PLN dan BPBD Kabupaten Malang

Sumber: BPBD Kabupaten Malang, 2024

Guna meningkatkan kemampuan masyarakat Kabupaten Malang selainnya, BPBD Kabupaten Malang telah mengupayakan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebanyak-banyaknya. Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Hal itu disebabkan pembentukan Destana tidak selalu mendapatkan respons yang baik dari masyarakat atau pihak terkait. Penawaran pembentukan Destana juga sering mendapatkan penolakan dari desa-desa yang merasa bahwa wilayahnya aman dari bencana. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Yulius bahwa:

“Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa bencana ini memang dikatakan penting, tapi kadang kala dipandang sebelah mata. Kalau orang tidak pernah terdampak bencana aman aman saja, jangankan masyarakat, kita pernah menawarkan di suatu desa karena memang dia pernah mengusulkan destana beberapa tahun memang belum tercover karena potensi rawannya rendah dan jawabnya perangkat desa “nggak perlu pak disini aman aman saja”. Ya pernah seperti itu. Dan setelah terdampak waktu itu angin kencang kalau nggak salah, dan baru minta lagi. Awalnya kita tawari bilangnyanya udah lah nggak usah pak buat desa lain saja. Masih ada aja yang menolak. Jadi bukan kesadaran masyarakat masalah bencana, tapi ini dari perangkat desanya yang menolak.”(Hasil wawancara 23 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan, maka mampu disimpulkan bahwa Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana melalui Destana Jatirejoyoso tidak berjalan dengan optimal pada dimensi adaptasi ini. Hal itu disebabkan pasifnya Destana Jatirejoyoso dalam mengadakan kegiatan kebencanaan ataupun dalam kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang dibentuk. Kepasifan tersebut berdampak pada tidak adanya pelatihan lanjutan yang diberikan oleh pihak BPBD Kabupaten Malang. BPBD Kabupaten Malang pun menyadari bahwa yang sulit bukanlah pada saat pembentukan, akan tetapi ketika mempertahankan agar FPRB yang dibentuk tetap aktif dijalankan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, BPBD Kabupaten Malang telah melakukan upaya dengan melaksanakan evaluasi terhadap Destana yang telah dibentuk. Namun, evaluasi tidak mampu secara rutin ataupun secara pasti diselenggarakan. Sebab keterbatasan anggaran yang mengakibatkan evaluasi tidak mampu dengan rutin dilaksanakan. Tidak hanya itu, anggaran yang terbatas dari BPBD juga menjadi pemicu minimnya Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dibentuk setiap tahunnya, minimnya sarana prasarana yang diberikan kepada Destana. Sebagai bentuk solusi keterbatasan anggaran, maka BPBD Kabupaten Malang juga membangun kerja sama dengan pihak swasta. Salah satu kerja sama di tahun 2024 adalah dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Brantas. Dari kerja sama tersebut, di tahun 2024 BPBD Kabupaten Malang mampu membentuk 1 (satu) Destana tambahan. Sementara itu, untuk permasalahan minimnya sarana prasarana yang disediakan oleh BPBD Kabupaten Malang mampu diatasi dengan anggaran Desa masing-masing.

Meskipun segala upaya telah dilaksanakan oleh BPBD untuk memperbanyak kesempatan membentuk Destana, tetapi masih terdapat pemerintah desa yang menolak. Alasan yang melatarbelakangi penolakan tersebut adalah minimnya bencana yang terjadi di desa tersebut. Sementara itu, terdapat beberapa bencana yang tidak mampu diprediksi waktu dan tempat terjadinya seperti gempa bumi, angin puting beliung, dan sebagainya. Penolakan tersebut membuktikan bahwasannya masih terdapat pemerintah desa yang menolak untuk ditingkatkan kemampuan mitigasi bencananya. Berkaitan dengan dimensi pencapaian tujuan, dari penolakan ini juga mampu dibuktikan

bahwasannya pemahaman masyarakat secara umum masih belum memahami bagaimana pentingnya pembentukan Destana di wilayahnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan, mampu disimpulkan bahwa pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui Destana Jatirejoyoso dianggap belum efektif dalam mengurangi bencana. Dari total 3 dimensi, hanya dimensi integrasi yang berjalan optimal. Sementara itu, dimensi pencapaian tujuan dan adaptasi masih perlu ditingkatkan. Tidak optimalnya dimensi pencapaian tujuan diakibatkan pemahaman penanggulangan bencana oleh masyarakat Kepanjen yang masih terbatas. Masyarakat Kecamatan Kepanjen, termasuk masyarakat Jatirejoyoso, masih sering membuang sampah di sungai. Sementara itu, dimensi adaptasi belum optimal sebab dipicu oleh beberapa masalah seperti pasifnya FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) Destana Jatirejoyoso, dan terbatasnya anggaran BPBD Kabupaten Malang. Keterbatasan anggaran memicu juga terbatasnya Destana yang dibentuk dan sarana prasarana yang diberikan kepada setiap Destana. Guna mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi, maka peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Desa Jatirejoyoso perlu memprioritaskan pengadaan sarana prasarana kebencanaan seperti peralatan kebencanaan. Sosialisasi penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Malang bersama *stakeholder* lainnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kecamatan Kepanjen melalui program MSAB (Madrasah/Sekolah Aman Bencana), PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi) atau keluaran lainnya yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldah, A., Duarisah, A. V., & Maulana, R. A. (2023). Clustering Daerah Rawan Bencana Alam Di Indonesia Berdasarkan Provinsi Dengan Metode K-Means. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 14(2), 31–36.
- BPBD Kabupaten Malang. (2022). *Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023* (pp. 1–2).
- BPBD Kabupaten Malang. (2024). *Pelatihan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen kabupaten malang*. Instagram. https://www.instagram.com/p/C4linzepHUz/?utm_source=ig_web_copy_link
- BPBD Kabupaten Malang. (2025). *Informasi Bencana di Kabupaten Malang tanggal 24 Januari 2025*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DFNIAI5ymwW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
- BPS Kabupaten Malang. (2024). *Kabupaten Malang Dalam Angka 2024*.
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In

Sanabil Creative.

<http://www.academia.edu/download/35360663/METODE PENELITIAN KU ALITAIIF.docx>

- Diskominfo Kabupaten Malang. (2025). *Call Center 112 Kabupaten Malang*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DIbTsHVp7Mh/?utm_source=ig_web_copy_link
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur 2022 - 2026, (2022).
- Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Brantas dan Pemerintah Kabupaten Malang, Pub. L. No. 0012.MoU/STH.01.01/PLNNP030005/2024 (2024).
- Duncan, R. B. (1973). Multiple Decision-making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness. *Human Relations*, 26(3), 274–275.
- Dzunurroini, L. (2023). *Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Timur*. 1–23.
- Hadaf, M. R., Alamsah, A. K., & Safitri, D. I. (2022). Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang). *Journal of Governance Innovation*, 4(1), 27–45. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1162>
- Keputusan Kepala Desa Jatirejoyoso No. 15 tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, (2024).
- Malang, B. K. (2021). *Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang 2021-2026* (pp. 1–88).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook (Edition 3)*.
- Putri, A. M. H. (2022). *Peringatan! RI Masuk 3 Besar Negara Paling Rawan Bencana*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221206102823-128-394143/peringatan-ri-masuk-3-besar-negara-paling-rawan-bencana>
- Sabir, M. R. P., & Mokodompit, E. A. (2023). Analisis potensi maritim indonesia. *Osf.io*, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/dnrt3>
- Steers, R. M. (1980). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suminto, M. R. (2023). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Undang Undang RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Wicaksana, Y. S. W. (2024). *Bencana Alam Cenderung Turun di Kabupaten Malang, Ini Musibah Terbanyak selama 2023*. Radarbatu.Jawapos.Com. <https://radarbatu.jawapos.com/peristiwa/2323720022/bencana-alam-cenderung-turun-di-kabupaten-malang-ini-musibah-terbanyak-selama-2023>

Wiyatiningsih. (2020). *Tata Ruang Kota Berbasis Pengurangan Risiko Bencana*. Universitas Kristen Duta Wacana

Wawancara/Interviews

Afifudin, Mukhamad. (2025). Desa Jatirejoyoso, 11 April, 2025.

Chandra. (2025). Desa Jatirejoyoso, 11 April, 2025.

Dharmawan, Yulius. (2025). Kabupaten Malang, 23 April, 2025.

Supriono. (2025). Kecamatan Kepanjen, 11 April, 2025.

Verdiana, Silvia. (2025). Kabupaten Malang, 5 Maret, 2025.